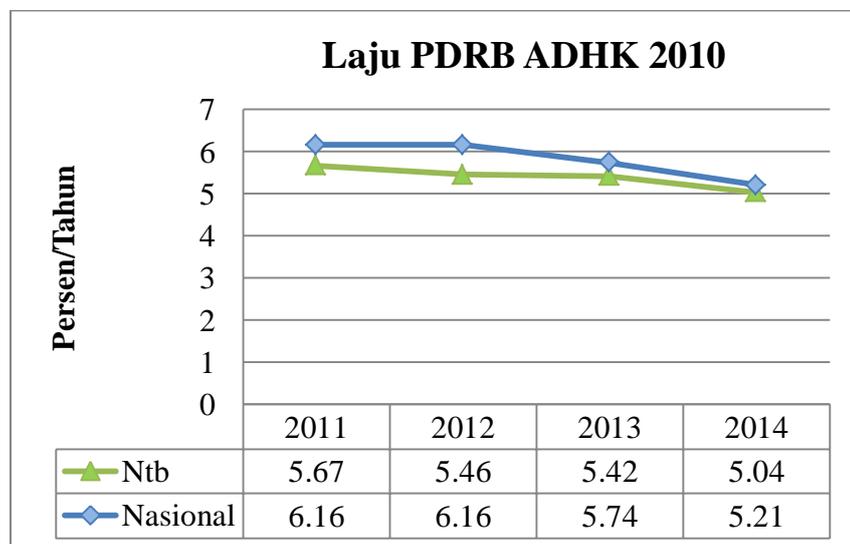


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang yang terdiri dari tiga aspek yaitu proses, output per kapita, dan jangka panjang (Boediono, 1988).



Sumber: BPS dalam (Analisis Pembangunan Wilayah NTB, 2015)

Gambar 1.1
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 NTB dan Indonesia

Pertumbuhan ekonomi daerah dapat diukur dengan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Sejak tahun 2011 hingga tahun 2014 pertumbuhan ekonomi nasional cenderung menurun begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi di NTB, akan tetapi persentase pertumbuhan ekonomi NTB perurunannya lebih besar dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Sedangkan jika dilihat dari Persentase pertumbuhan ekonomi NTB dari tahun tahun

2011 hingga 2015, pertumbuhan ekonominya fluktuatif (lihat tabel 1.1) hal ini berasal dari turunya pertumbuhan ekonomi secara drastis di Kabupaten Sumbawa Barat hingga minus pada 2011 hingga 2012, kontribusi PDRB Sumbawa Barat paling dominan berasal dari pertambangan dan penggalan. Oleh karena itu, ketika terjadi penurunan produksi pada sektor tersebut, pertumbuhan ekonomi kabupaten secara keseluruhan (regional) juga ikut menurun. akan tetapi di tahun yang sama juga kontribusi pertumbuhan ekonomi NTB didorong oleh Lombok Tengah dari sebesar 10,89 persen menjadi 13,72 persen. Dan pada tahun 2013 hingga 2014 pertumbuhan ekonomi kontribusi terbesarnya dari Kota Mataram yakni dari 7,95 persen menjadi 8,1 persen meskipun sebelum itu persentase pertumbuhan ekonomi di Mataram terbilang rendah. Lihat data dibawah ini.

Tabel 1.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi ADHK 2010 menurut kab./kota NTB

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kab./Kota (Persen)				
	2011	2012	2013	2014	2015
Kabupaten Lombok Barat	6,05	5,27	5,26	5,7	6,39
Kabupaten Lombok Tengah	10,89	13,7	6,24	6,28	5,58
Kabupaten Lombok Timur	6,23	5,43	5,51	4,8	5,94
Kabupaten Sumbawa	6,97	6,67	6,44	6,63	6,43
Kabupaten Dompu	7,2	6,18	5,05	5,54	6,16
Kabupaten Bima	6,05	5,95	5,11	6,01	6,27
Kabupaten Sumbawa Barat	-28,2	-26,3	3,53	-1,3	107
Kabupaten Lombok Utara	5,34	4,08	4,11	4,59	4,73
Kota Mataram	2,96	1,04	7,95	8,10	7,99
Kota Bima	5,12	5,6	5,58	5,89	5,76
Nusa Tenggara Barat	-3,91	-1,54	5,16	5,17	21,8

Sumber: Badan Pusat Statistik, NTB

Kecenderungan bergantung pada satu sektor ekonomi saja, membuat pertumbuhan ekonomi menjadi rentan, Ketika output pada satu sektor tersebut

menurun maka pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan akan terganggu. Rendahnya pertumbuhan ekonomi, membuat produktivitas marginal penduduknya rendah. Ini berarti penambahan penggunaan tenaga kerja tidak meningkatkan produksi nasional justru pendapatan per kapita menurun yang menyebabkan kemerosotan kesejahteraan masyarakat (Sukirno, 2004).

Penyebab lain rendahnya pertumbuhan ekonomi adalah fasilitas infrastruktur yang belum memadai. Infrastruktur jalan, masih menjadi keluhan masyarakat Sumbawa, karena jika dibandingkan dengan Lombok infrastruktur di Sumbawa terbelakang jauh tertinggal yakni Sumbawa, antara 12,6 hingga 51,44 persen. Sedangkan Lombok dengan tingkat kemantapan jalan kota/kabupaten 37,83 hingga 71,55 persen (Lombok Post, 2017).

NTB terdiri atas daerah kepulauan, memiliki kekayaan sumber daya alam yang cukup mumpuni untuk memompa pertumbuhan ekonomi seperti tambang, pariwisata, pertanian dan lain-lain. Tentu hal ini berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam mengelola kekayaan alam dan menyediakan fasilitas pembangunan, oleh karena itu bentuk intervensi pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi adalah melalui kebijakan fiskal.

Tujuan dari kebijakan fiskal adalah menstabilkan harga tingkat output, memperlebar kesempatan kerja dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi (Anitasari & Soleh, 2015). Dalam kebijakan fiskal, pemerintah mengalokasikan penerimaan negara dalam bentuk pajak, sesuai dengan pendapat Keynes bahwa ada dua pendekatan pemerintah dalam melakukan kebijakan fiskal yaitu melalui pajak (*income approach*) dan pengeluaran

(*expenditure approach*) Mankiw dalam (Merlin, 2017). Keynes mengatakan, perekonomian akan lebih baik jika pajak diturunkan dan meningkatkan pengeluaran dalam menentukan komposisi APBN/APBD.

APDB memiliki peran sebagai otorisasi, perencanaan, mengawasi, alokasi, distribusi dan stabilisasi Bastian dalam (Basuki, 2016). Peran otorisasi adalah anggaran daerah merupakan dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja pada tahun terkait. Peran perencanaan adalah anggaran daerah menjadi manajemen daerah dalam merencanakan kegiatan pada tahun terakit. Peran pengawasan adalah untuk menilai kinerja pembangunan dengan berpatokan pada undang-undang yang berlaku. Peran alokasi adalah anggaran diarahkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan penggunaan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian. Dan peran stabilitas adalah anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan fundamental perekonomian daerah.

Dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi di Indonesia pemerintah membuat kebijakan pengembangan otonomi daerah, agar pemerintah daerah dapat mengembangkan perekonomian berdasarkan potensi masing-masing daerah. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang selanjutnya diubah menjadi undang-undang nomor 23 tahun 2014 pasal 1 mengatakan bahwa, penyelenggaraan urusan daerah dikendalikan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan daerah, dan memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat.

Melalui otonomi daerah, dapat mengoptimalkan pengelolaan kemampuan sumber daya alam dan manusia di masing-masing daerah sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah, NTB selaku salah satu daerah otonom, juga mengupayakan pengembangan potensi ekonomi wilayahnya. Ini merupakan salah satu cara agar pelaku ekonomi berperan aktif dan mampu memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional dan juga. Di bawah ini merupakan PDRB NTB menurut lapangan usaha.

Tabel 1.2
PDRB NTB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha PDRB	PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat			
	ADH Kontan 2010 (Juta Rupiah)			
	2011	2012	2013	2014
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15,691,914	16,407,442	16,946,743	17,702,366
Pertambangan dan Penggalan	14,709,393	10,788,742	11,254,503	11,238,698
Industri Pengolahan	3,277,041	34,148,735	35,395,368	3,658,662
Konstruksi	6,139,781	63,663,067	66,969,633	7,219,308
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Sepeda Motor dan Mobil	7,662,944	83,931,033	90,526,635	9,747,296
Transportasi dan Pergudangan	4,427,516	4,717,941	49,639,827	5,335,371

Sumber: Badan Pusat Statistik, NTB

Berikut adalah sektor yang paling banyak memberikan kontribusi untuk PDRB di Provinsi NTB Selama empat tahun terakhir. PDRB merupakan indikator untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan PDRB dari tahun 2011 hingga 2014 meningkat dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2011 hingga 2014 sektor pertanian merupakan pendorong PDRB paling dominan, akan tetapi pertumbuhannya cenderung lambat dari tahun ke tahun.

Sektor pertanian memegang peranan dalam meningkatkan perekonomian, Pada tahun 2013 penyerapan tenaga kerja di NTB didominasi oleh sektor pertanian yakni sebesar 45,02 persen (Badan Pusat Statistik NTB, 2013). Seperti yang disampaikan oleh Presiden pemerintahan yang sekarang, bahwa perekonomian NTB saat ini disokong oleh sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 24,14 persen. Sektor pertanian sangat krusial untuk diperhatikan oleh pemerintah melalui pengeluaran pemerintah, serta faktor pendukung pengembangan sektor pertanian yakni, infrastruktur sebagai akses utama dalam pendistribusian hasil pertanian, pengeluaran pemerintah berfungsi dalam membiayai pelaksanaan program-program yang telah diwacanakan dinas terkait untuk pembangunan sektor pertanian (Suwanti & Gunanto, 2013). Eberedike (2012), dalam penelitiannya menghasilkan pengeluaran pemerintah di sektor pertanian signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Nigeria.

Peranan pemerintah dalam memainkan peran sebagai penggerak utama perekonomian sangat strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kesiapan Sektor infrastruktur juga penting dalam menunjang aktivitas perekonomian. Sektor infrastruktur berkesimbangan dengan sektor-sektor lain, dalam menyokong kelancaran aktivitas perekonomian. Hal serupa juga dikemukakan oleh Friawan (2008), dalam menjelaskan pentingnya infrastruktur dalam integrasi perekonomian, yaitu: *pertama*, kebedaradaan infrastruktur yang baik merupakan motor penggerak utama dalam memicu pertumbuhan ekonomi. *Kedua*, perolehan manfaat dari integrasi memerlukan

dukungan jaringan infrastruktur yang memadai dalam memperlancar aktivitas perdagangan dan investasi. *Ketiga*, alternatif lain untuk mengatasi kesenjangan pembangunan ekonomi antar daerah adalah melalui perbaikan infrastruktur.

Infrastruktur memiliki kontribusi yang besar dalam mempercepat proses pembangunan ekonomi, disamping akan menjadi alat pacu pertumbuhan ekonomi juga menjadi jembatan untuk melancarkan transaksi ekonomi serta sebagai jalan untuk mengurangi ketimpangan. Infrastruktur adalah fasilitas atau alat yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan sistem sosial Grigg dalam (Bangun & Muhammad, 2009). *The World Bank* (1994), mengklasifikasikan infrastruktur menjadi tiga, yaitu:

- 1) Infrastruktur ekonomi adalah Infrastruktur berupa fisik untuk menunjang kegiatan ekonomi, terdiri dari (*public utilities*) tenaga kerja, gas, air, sanitasi, telekomunikasi, (*public work*) jalan, bendungan, kanal, irigasi dan drainase (*transportation sector*) jalan, rel, pelabuhan, lapangan terbang dan lain sebagainya.
- 2) Infrastruktur sosial, yang termasuk dalam katagori ini adalah Pendidikan, kesehatan dan perumahan.
- 3) Infrastruktur administrasi terdiri dari penegakan hukum, control administrasi dan koordinasi.

Pemerintah, melalui peraturan presiden Nomor 42 tahun 2005 tentang komite percepatan penyediaan infrastruktur, memaparkan jenis infrastruktur yang penyediaanya diatur oleh pemerintah yakni infrastruktur transportasi,

infrastruktur jalan, infrastruktur pengairan, infrastruktur telematika, infrastruktur ketenagalistrikan dan infrastruktur pengangkutan minyak dan gas bumi. Dalam rangka mempercepat pembangunan di NTB, Pemerintah daerah melakukan pembangunan Infrastruktur diberbagai aspek, dipaparkan juga dalam RPJMD NTB (2013-2018), infrastruktur menjadi salah satu prioritas pembangunan di NTB. Hal ini berkaitan dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,90%, menurunkan angka kemiskinan menjadi 16,25%, tingkat pengangguran terbuka 3,5%, inflasi 2,77% dan indeks gini rasio 0,273%. (WartaNTB.com, 2017).

Penelitian yang dilakukan Babatunde (2016), menunjukkan bahwa pengeluaran di sektor infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pengeluaran pemerintah di sektor tersebut maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. Hedarmin (2012), juga melakukan penelitian dengan variabel yang sama, hasilnya menunjukkan, tidak ada pengaruh yang signifikan antara pengaruh pengeluaran sektor infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dampak positif terhadap peningkatan pengeluaran pemerintah adalah semakin meningkatnya aktivitas ekonomi, yang mana meningkatkannya juga aliran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Susanto (2014), melakukan penelitian tentang analisis kemampuan keuangan daerah pemerintah Provinsi NTB, hasil penelitiannya adalah berdasarkan pengukuran Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) dan klasifikasi kriteria tingkat keuangan daerah Provinsi NTB memiliki kemampuan keuangan yang tinggi. (Novianto & Atmanti, 2013) juga

menghasilkan penelitian, PAD positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Melihat dari potensi sumber daya alam yang dimiliki NTB, peluang meningkatkan PAD dapat dimanfaatkan secara optimal. Terutama untuk membiayai sektor-sektor unggulan daerah salah satunya sektor pariwisata.

Pengembangan sektor pariwisata menjadi perhatian publik di NTB, setelah mendapatkan predikat wisata halal terbaik di dunia tahun 2015 dan 2016. Tidak hanya itu, NTB juga dinobatkan sebagai wisata tempat bulan madu halal terbaik di dunia tahun 2016. Hal ini pantas diraih oleh NTB, karena Pulau Lombok merupakan bagian dari NTB dikenal sebagai Pulau Seribu Masjid, dan juga mayoritas masyarakat NTB pemeluk agama islam. Faktor pendukung lainnya yang menarik di NTB adalah keindahan Alamnya, keunikan seni budaya, aneka makanan tradisional, serta keramah tamahan masyarakatnya (Media Republika.co.id, 2017).

Isik & Aslan (2009) hasil penelitiannya, dalam jangka panjang sektor pariwisata positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Turki dan dapat stabil dalam jangka panjang. Hal ini bisa menjadi salah satu pendorong peran pemerintah untuk mengembangkan sektor pariwisata dalam mengatur, menyediakan, menentukan berbagai infrastruktur yang tepat untuk pengembangan pariwisata (Damanik dan Weber, 2006).

Hermawan, (2012) dalam penelitiannya memaparkan tentang dampak pariwisata dalam perekonomian nasional, bahwa pada tahun 2009 sektor pariwisata mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 104,87 orang (6,68%). Lanjutnya, secara nasional keberadaan sektor pariwisata merupakan sektor

yang tahan terhadap krisis ekonomi, terbukti bahwa pada krisis tahun 1998 transaksi pariwisata masih mampu menggerakkan roda perekonomian hingga sampai unit yang paling kecil, oleh karena itu apabila komponen-komponen ekonomi pariwisata dapat tumbuh pesat maka kontribusi terhadap perekonomian nasional akan sangat dominan.

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing secara global melalui peran pengeluaran pemerintah dalam mendanai penyediaan infrastruktur, pengembangan sektor-sektor yang unggul seperti pertanian dan pariwisata serta meningkatkan kemandirian daerah dalam mendanai program pembangunan dibutuhkan perencanaan yang matang agar pembangunan sesuai dengan sasaran yakni kesejahteraan masyarakat. Dalam Buku Agenda Pembangunan Nasional tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, ada empat langkah konkret untuk mendorong terciptanya kesempatan kerja yang berkualitas, yakni: (a) meningkatkan produktivitas, melalui akslerasi penyerapan tenaga kerja ke industri yang memberikan nilai tambah dan berproduktivitas tinggi akan membuka peluang kesempatan kerja selebar lebarnya, termasuk sektor pertanian melalui sektor pengelolaan industri; (b) meningkatkan standar hidup pekerja, tidak terkecuali pekerja miskin melalui penyediaan lapangan kerja produktif; (c) transformasi struktur tenaga kerja, hal ini dapat dilakukan dengan dukungan fasilitas seperti infrastruktur pengembangan kompetensi untuk pekerja yang dapat meningkatkan *skill* di bidang industri; (d) memberikan insentif bagi investasi

yang menciptakan padat karya hal ini berlaku juga untuk pelaku usaha kecil-menengah.

Melalui otonomi daerah diharapkan mampu untuk menggali potensi sumber daya yang dimiliki NTB, sehingga akan mencapai tujuan pembangunan ekonomi, dengan pengoptimalan pengelolaan daerah disektor-sektor yang berpotensi yang akhirnya akan menciptakan kemandirian ekonomi suatu daerah. Dari latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait pengeluaran pemerintah di sektor Infrastruktur, Pertanian, Pariwisata dan PAD daerah NTB dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi NTB periode tahun 2011-2015. Dengan harapan melalui penelitian ini mampu membuktikan variabel-variabel diatas dapat memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat mecapai tujuan pembangunan ekonomi kesejahteraan dan keadilan.

B. Ruang Lingkup Penelitian

Studi kasus penelitian ini adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat melibatkan 10 kabupaten yakni Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima, Sumbawa Barat, Lombok Utara, Kota Mataram dan Kota Bima. Sedangkan ruang lingkup dari penelitian ini adalah melihat pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor Pertanian, pariwisata dan infrastruktur serta PAD terhadap pertumbuhan ekonomi NTB periode 2011 hingga 2015. Adapun ketiga sektor pengeluaran pemerintah berkaitan dengan pengeluaran pemerintah secara umum disektor tersebut. Sedangkan PAD

berkaitan dengan seluruh PAD provinsi NTB menurut kabupaten/kota periode 2011-2015.

C. Rumusan Masalah

Mengacu pada permasalahan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi NTB tahun 2011-2015?
2. Bagaimanakah pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi NTB tahun 2011-2015?
3. Bagaimanakah pengaruh jumlah pengeluaran pemerintah sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi NTB tahun 2011-2015?
4. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi NTB tahun 2011-2015?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian paparan pada latar belakang, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi NTB tahun 2011-2015
2. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor Pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi NTB tahun 2011-2015
3. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah disektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi NTB tahun 2011-2015

4. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2011-2015

E. Manfaat Penelitian

Bagi akademisi, penelitian ini bermanfaat sebagai literatur atau sumber acuan untuk penelitian berikutnya. Khususnya penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian yang sejenis.

Sedangkan manfaat penelitian Bagi praktisi adalah, hasil penelitian dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah khususnya wilayah NTB dalam membuat keputusan terhadap pengelolaan anggaran belanja sektor terkait guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi.